

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
 1. Perkembangan harga Kabupaten Konawe didasarkan pada informasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe yang dikeluarkan secara mingguan
 2. Harga rata-rata komoditas relatif stabil selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejala harga yang signifikan.
 3. Harga rata-rata komoditas relatif meningkat selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
 1. Komoditas Beras naik sebesar atau 10,00%, kenaikan diperkirakan akibat Kurangnya masyarakat yang menanam Padi karena Irigasi dalam perbaikan maka dari itu adanya dampak tersebut ada kenaikan harga
 2. Komoditas Bawang merah naik sebesar atau 22,92%, kenaikan diperkirakan akibat kurangnya pasokan dari wilayah provinsi Sulawesi Tenggara dan permintaan dari konsumen meningkat
 - Komoditas Bawang putih naik sebesar atau 21,21%, kenaikan diperkirakan akibat kurangnya pasokan dari luar wilayah provinsi dan permintaan konsumen tinggi maka dari terjadilah harga melonjak
 1. Harga rata-rata komoditas daging ayam dan minyak goreng relatif menurun selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
 2. Komoditas Daging Ayam Ras turun sebesar 0,62%, menurun diperkirakan akibat adanya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat
 3. Komoditas Minyak Goreng turun sebesar 8,34%, menurun diperkirakan akibat adanya stok masih banyak dan daya pembeli berkurang.

No	Komoditas	Rata-rata harga Oktober 2022 (Rp)	Rata-rata harga November 2022 (Rp)	Rata-rata harga Desember 2022 (Rp)
1	Beras	10.000	10.000	12.000
2	Jagung	19.000	17.000	19.000
3	Bawang Merah	30.000	40.000	45.000
4	Bawang Putih	27.500	30.000	40.000
5	Cabai Besar	47.500	33.125	30.625
6	Cabai Rawit	45.000	38.750	35.000
7	Daging Sapi/Kerbau	140.000	140.000	140.000
8	Daging Ayam Ras	32.000	30.000	31.500
9	Telur Ayam Ras	32.500	32.000	33.000
10	Gula Pasir	16.000	16.000	16.000
11	Minyak Goreng	24.250	20.500	20.250

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Konawe pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut.

1. Tingginya permintaan pada saat HBKN Natal dan Tahun Baru
2. Tingginya permintaan komoditas pangan dari Sulawesi Tengah untuk mendukung pekerja industri pengolahan

Produksi pangan yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien akibat infrastruktur pendukung distribusi yang masih terbatas seperti jalan rusak

4. Infrastruktur pendukung yang masih terbatas dan jaringan distribusi yang belum lancar.
 5. Tingginya ketergantungan Kabupaten Konawe dengan daerah lain seperti Makassar
 6. Terbatasnya informasi komoditas pangan strategis Sulawesi Tenggara, seperti (1) informasi surplus dan defisit, (2) informasi pola tanam komoditas, (3) informasi kebutuhan dan konsumsi komoditas strategis untuk mendukung arah kebijakan strategis.
 7. Kapasitas produksi yang terbatas akibat teknologi yang terbatas
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Rapat koordinasi menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan harga pada Minggu ketiga Desember 2022.
 2. Sidak pasar pada akhir Desember 2022 menjelang hari raya Idul Fitri.
 3. Pemberian bantuan kepada petani dan UMKM untuk mengantisipasi terjadinya inflasi.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Perluasan inovasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak akibat tingginya harga komoditas pangan saat ini.
 2. Mendorong penguatan sarana dan prasarana produksi pangan untuk mendorong tingginya produksi pangan di wilayah Kabupaten Konawe.
 3. Perlunya mengevaluasi kembali jalur perdagangan di wilayah Kabupaten Konawe sehingga untuk menentukan skema kerjasama antar daerah ke depan. Jalur perdagangan tersebut termasuk untuk mengurangi keterlibatan agen yang dapat meningkatkan harga.
 4. Perlunya penyelerasan program kerja pemerintah daerah dengan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi.
 5. Perlunya pemantauan harga dan stok berkala untuk mengidentifikasi kondisi harga dan pasokan komoditas strategis. Saat ini harga dan stok sudah tersedia di Dinas , namun kurangnya komunikasi menyebabkan informasi belum dapat digunakan secara lebih komprehensif.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Memperkuat koordinasi antar OPD untuk secara konsisten melakukan pembaharuan data pasokan, kebutuhan, dan harga sehingga dapat menjadi langkah awal dalam menentukan upaya pengendalian kedepan dan memitigasi kemungkinan terjadinya keterbatasan suplai.
 2. Memantau keberlanjutan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
 3. Mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga antar daerah.
 4. Terus memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui kegiatan sidak pasar, pengembangan komoditas pangan strategis menggunakan teknologi tepat guna, serta pendampingan dan fasilitasi kelompok tani/nelayan untuk meningkatkan produktivitas.
 - 3.

Melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan